



Analisis Efektivitas Belanja Desa Pada Desa Tanjung Putri

Septa Soraida

Universitas Palangka Raya

septasoraida@feb.upr.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of Tanjung Putri village government spending from 2020-2022. This type of research is quantitative using APBDes realization report data. The research results prove that the effectiveness of Tanjung Putri village government spending has decreased from 2020-2022. In 2020 it was 87.99% and for 2021 the percentage of effectiveness decreased by 85.42%, meaning there was a decrease of 2.57% from the previous year, while in 2022 the percentage of effectiveness decreased again from the previous year, namely 81.11%. Even though there has been a decline from year to year, the regional government spending category is still in the effective category.

Keywords: APBDes, Spending Effectiveness, Village Funds

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas belanja pemerintah desa Tanjung Putri dari tahun 2020-2022. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data Laporan realisasi APBDes. Hasil penelitian membuktikan bahwa efektifitas belanja pemerintah desa Tanjung Putri mengalami penurunan dari tahun 2020-2022. Tahun 2020 sebesar 87,99% dan untuk tahun 2021 persentase efektifitas mengalami penurunan sebesar 85,42% artinya ada penurunan sebesar 2,57% dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2022 persentase efektifitas kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 81,11%. Meskipun mengalami penurunan dari tahun ketahun kategori belanja pemerintah daerah masih berada didalam ketori efektif.

Kata kunci : APBDes, Efektivitas Belanja, Dana Desa

LATAR BELAKANG

Otonomi tidak hanya fokus pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tetapi otonomi sudah mulai dijalankan ke pemerintah yang cakupannya lebih kecil yaitu pemerintah desa. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan adalah dengan cara memberikan pendanaan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa diberikan kewenangan dalam mengelola dana tersebut sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa. Penyaluran bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah desa disebut dengan dana desa. Dana desa merupakan bagian dari anggaran yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa selain itu dana desa dalam jangka panjang diharapkan dapat berdampak pada pemerataan pembangunan.

Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk (i) Meningkatkan pelayanan publik desa; (ii) Memajukan perekonomian desa; (iii) Mengentaskan kemiskinan; (iv) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan (v) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Pada dasarnya pemanfaatan dana desa lebih ditekankan pada dua aspek yaitu peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi desa. Pembagian Dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintha daerah sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 dana desa diperkirakan mencapai angka Rp 70 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 68 triliun.

Peningkatan dana desa yang signifikan dari tahun ke tahun sudah seharusnya juga diimbangi dengan pengelolaan dana yang maksimal jika hal ini tidak dilakukan maka anggaran yang telah ditetapkan tidak akan dirasakan secara optimal oleh masyarakat oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana efektifitas belanja desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanjung Putri

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan melakukan analisis efektifitas belanja, Pemerintah Desa Tanjung putri dapat mengetahui bagaimana efektifitas belanja selama periode tertentu. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas belanjanya sehingga pada periode berikutnya efektifitas belanja desa dapat terlaksana dengan lebih baik sehingga kinerja pemerintah juga dapat meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas belanja Pemerintah Desa Tanjung putri tahun anggaran 2020-2022 yang diukur menggunakan beberapa rasio efektivitas.

KAJIAN TEORITIS

Dana Desa

Menurut peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 145 tahun 2023 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa memerlukan hal yang krusial yaitu dana desa. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa. Ada enam Prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yaitu :

1. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan
2. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
3. Kewenangan Desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
4. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
5. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, yaitu pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal
6. Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disusun sesuai format yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014. APBDes terdiri dari tiga komponen utama yaitu : Pendapatan, belanja dan pembiayaan. Belanja desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari Laporan Realisasi APBDes Desa Tanjung Putri tahun 2020-2022

Analisis Data

Analisis Data Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Analisis Efektifitas belanja daerah

Analisis Efektivitas Belanja Desa

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Menurut UU no 33 Tahun 2004. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Menurut Mahmudi (2010) efisiensi belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 % – 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

(dalam Bisma dan Susanto, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 2. Perbandingan ANggaran Belanja dan Realisasi Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Efektivitas	Kategori
2020	1.148.624.900,00	1.010.754.700,00	87,99%	Cukup efektif
2021	905.093.200,00	773.212.550,00	85,42%	Cukup efektif
2022	1.741.257.601,00	1.412.370.151,00	81,11%	Cukup efektif

Berdasarkan analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase analisis efektifitas belanja pada desa Tanjung putri mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 nilai efektifitas berada pada 87,99% artinya hampir mendekati angka efektif akantetapi pada tahun 2021 persentase efektifitas mengalami penurunan sebesar 85,42% artinya ada penurunan sebesar 2,57% dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2022 persentase efektifitas Kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 81.11% dan ada selisih sebesar 4,31% jika dibandingkan dengan persentase tahun 2021.

Komponen anggaran belanja harusnya dapat lebih dilaksanakan sesuai dengan napa yang telah di anggaran dalam APBDes sebab dengan adanya belanja yang optimal diharapkan dapat memberikan peningkatan sumberdaya manusia secara maksimal selain itu juga diharapkan dapat memberikan sarana dan prasarana serta infrastuktur yang memadai sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa dalma jangka Panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektifitas belanja daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 87,99% kemudian mengalami penurunan ditahun 2021 yaitu sebesar 85,42% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 85,42%. Meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun kategori efektifitas masih berada kisaran cukup efektif akantetapi jika tidak dilakukan pembenahan dalam hal belanja yang dikhawatirkan standar efektifitas akan berubah menjadi kurang efektif oleh sebab itu penting bagi pemerintah desa Tanjung Putri untuk mengotimalkan belanja sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga pemanfaatan dana desa juga bisa dirasakan oleh masyarkat desa secara optimal pula.

DAFTAR REFERENSI

Bisma, I Dewa Gede dan Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3.

Kosmasa, I dan Wendy. 2022. *Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI*.

Mahmudi. 2010. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Buku saku dana desa 2023

Buku saku dana desa 2022

www.kompas.id

<https://djpb.kemenkeu.go.id/>

Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 Tahun 2014